

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Di Desa Kabawakole

Lia Hanifa*, Amalia Amalia, Roy Sugianto, Defilia Defilia

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

ipa.hanifa@gmail.com*

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibentuk sebagai penggerak roda perekonomian desa, dan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) sehingga tercapainya sebuah desa mandiri. Sebagai lembaga desa, BUMDesa wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit usahanya dengan baik, akuntabel dan transparan. BUMDesa harus membuat dan mencatat transaksi yang terjadi setiap hari secara sistematis menggunakan sistem akuntansi. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan memastikan penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan pada BUMDesa di Desa Kabawakole. Mitra kegiatan adalah pengelola BUMDesa dan aparatur pemerintah desa. Metode yang digunakan adalah ceramah/pemaparan, diskusi/tanya jawab, dan pendampingan mitra. Hasil yang dicapai adalah mitra memiliki pengetahuan dasar dalam menganalisis dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi pada badan usaha mereka serta mitra memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kata Kunci: akuntansi keuangan, BUMDesa, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Risal et al., 2020). Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan desa diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 4 pada undang-undang tersebut menyebutkan ada 9 (sembilan) tujuan pengaturan desa, salah satunya yang berbunyi mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Desa kemudian diberi opsi kewenangan penyelenggaraan empat bidang urusannya secara utuh, yakni tata kelola pemerintah desa, pembangunan desa, serta membina desa dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat di desa (Adan et al., 2022).

Salah satu keharusan Pemerintah Desa dalam mengelola keuangannya adalah membentuk suatu badan usaha yang dapat menjadi sasaran penyertaan modal. Lembaga ekonomi baru bagi masyarakat Desa itu diistilahkan sebagai BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa (Idrus & Syachbrani, 2020). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan (Sri & Dewi, 2014).

Saran Pengutipan:

Hanifa, L., Amalia, A., Sugianto, R., & Defilia, D. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Di Desa Kabawakole. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3). <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.344>

BUMDesa merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Filya, 2018). Berkenaan dengan perencanaan dan penderiannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat (Ramadana & Ribawanto, 2010). BUMDesa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri (Rahmawati, 2020).

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Lukmawati et al., 2014).

Selanjutnya, pengelolaan BUMDesa juga ditujukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kemudian dimanfaatkan untuk sepenuhnya kemakmuran Desa. Keberhasilan Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa ditentukan oleh strategi BUMDesa dalam mengelola secara optimal aset-aset dan potensi yang dimiliki Desa (Hayyuna et al., 2005)

Laporan keuangan menjadi gambaran penting di dalam melihat posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Kusuma et al., 2019). Pengelola BUMDesa wajib mencatat semua aktivitas usaha yang telah terjadi dan membukukannya ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang tersusun nantinya juga akan digunakan oleh pengelola BUMDesa dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Fakta dalam pengelolaan BUMDesa berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra BUMDesa Desa Kabawakole Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara baik atau dengan kata lain bahwa laporan keuangan masih sangat sederhana serta belum merujuk kepada standar akuntansi yang jelas. Pembukuan yang dilakukan setiap terjadinya transaksi hanya sebatas mencatat kas masuk dan kas keluar tanpa memperhatikan kaidah akuntansi. Hal tersebut disebabkan karena pengelola BUMDesa belum sepenuhnya mengetahui dan memahami proses akuntansi beserta standar akuntansi yang digunakan.

Kendala lain yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menghambat penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDesa. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan atau disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa atau pengelola BUMDesa yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.

Berdasarkan berbagai permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas, maka dianggap perlu melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan BUMDesa Desa Kabawakole, agar dapat membantu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Laporan Keuangan BUMDesa.

Tujuan penyelenggaraan program PKM ini yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelola BUMDesa tentang penyusunan dokumen laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

METODE

Menjawab kebutuhan tersebut, dosen dan mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Buton pada tanggal 8 Agustus 2022 mengadakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan

sasaran para pengelola BUMDesa Desa Kabawakole. Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini dengan sosialisasi dan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdesa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Di Desa Kabawakole.

Tabel 1. Program dan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Metode yang digunakan	Keterangan
1.	Survey dan Penetapan wilayah mitra	Pertemuan dan diskusi	Tim PKM, Kepala Desa Kabawakole
2.	Penetapan waktu kegiatan PKM	Pertemuan dan diskusi	Tim PKM, Kepala Desa Kabawakole dan Pengelola BUMDesa
3.	Sosialisasi dan Pendampingan	Pemaparan/ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Tim PKM, Kepala Desa Kabawakole, Aparatur Desa dan Pengelola BUMDesa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey dan Penetapan Wilayah Mitra

Tujuan Umum melakukan *Survey* lapangan adalah untuk mengamati secara langsung lokasi wilayah mitra. Kegiatan pengamatan dilakukan guna menggali dan mengumpulkan data yang diperlukan bagi topic pembahasan dan untuk mengetahui masalah yang terjadi di lokasi PKM. Pada tahap ini Tim PKM melakukan koordinasi guna penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Persiapan kegiatan yang dilaksanakan untuk merencanakan kegiatan yang mencakup penetapan waktu, materi dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Penetapan Wilayah Mitra dilakukan agar Kepala Desa Kabawakole mengizinkan Tim PKM melakukan pengabdian, agar mengetahui rencana dan jadwal kegiatan dan agar membantu mensosialisasikan kepada pengurus BUMDes bahwa akan diadakan kegiatan PKM.



Gambar 1. Koordinasi Tim PKM dengan Kepala Desa Kabawakole

Sosialisasi dan Pendampingan

Sebelum dilakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDesa terlebih dahulu dilakukan kegiatan penyampaian materi. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan *workshop*. Materi disampaikan dengan menggunakan *Slide show power point*. Dalam kegiatan ini bertujuan mentrasfer pengetahuan/informasi pada peserta kegiatan, untuk merubah pola pikir sehingga memudahkan pelaksanaan program PKM.



Gambar 2. Penyampaian Materi tentang Pelaporan Keuangan BUMDes

Materi Pelatihan Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, meliputi :

1. Pengenalan Sistem Informasi Keuangan BUMDes.
2. Tata cara penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Pencatatan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan dibuatnya laporan keuangan yang baik maka sebuah usaha dapat membuat keputusan bisnis yang baik, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidupnya. Keputusan tersebut dapat diambil dengan melihat laporan keuangan dan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan usaha. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa salah satu pendapatan asli desa adalah bersumber dari BUMDes. Maka dari itu, BUMDes juga harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari setiap transaksi yang terjadi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat menunjukkan posisi keuangan BUMDes dengan jelas dan digunakan untuk mempertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.

Materi yang diberikan tentang pengelolaan laporan keuangan BUMDes. Materi disampaikan setelah sesi perkenalan antara peserta dengan Tim PKM. Usai sesi perkenalan, Tim PKM (narasumber) melanjutkan dengan pembagian materi. Peserta diberi kesempatan untuk bertanya pada setiap sesi.

Sosialisasi ini menggunakan metode yang dapat menjamin bahwa peserta dapat mengimplementasi pengetahuannya setelah mengikuti/menghadiri sosialisasi. Adapun metode yang digunakan antara lain:

- 1) Metode Pemaparan/Ceramah; metode ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengertian, fungsi, siklus, jenis, dan prinsip akuntansi serta pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM).

- 2) Metode Diskusi/Tanya jawab; metode ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemahaman manajemen keuangan dan penyusunan dokumen laporan keuangan peserta/pengelola BUMDesa yang mengikuti kegiatan.
- 3) Metode Kasus/Contoh; metode ini memberikan beberapa gambaran kasus/contoh yang berkaitan dengan laporan keuangan organisasi (BUMDesa), serta cara penyelesaiannya.

Proses ini dimaksudkan agar peserta memiliki kapasitas memadai dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Setelah itu dilakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDesa, selanjutnya Tim PKM memberikan pemahaman tentang tiga laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi, neraca dan arus kas yang merupakan standar pelaporan keuangan untuk standar akuntansi yang berlaku pada Laporan Keuangan BUMDesa.



Gambar 3. Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan BUMDes

Untuk pendampingan pembuatan laporan keuangan BUMDesa, Tim PKM perlu mengulang/melakukan beberapa kali. Hal ini karena mitra belum pernah mendapat pelatihan serupa sebelumnya. Namun setelah melewati beberapa kali latihan, mencoba memasukkan transaksi sendiri, Tim PKM melihat bahwa mitra telah mampu untuk melanjutkan sendiri sistem pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan BUMDesa pada bulan berikutnya. Namun demikian, tim pendamping bersifat terbuka, apabila di masa mendatang pengurus BUMDesa Kabawakole masih membutuhkan bantuan, Tim PKM akan dengan senang hati memberikan bantuan. Partisipasi peserta (pengurus BUMDes, Aparatur Desa) dalam kegiatan ini sangat antusias dan proaktif yang terlihat pada keterlibatan semua peserta mitra yang hadir dalam kegiatan.

Luaran dalam kegiatan ini adalah dokumen laporan keuangan BUMDesa Kabawakole. Target yang telah dicapai adalah meningkatnya pemahaman Pengelola BUMDesa dan Aparatur Pemerintah Desa tentang pengetahuan dasar dalam menganalisis dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi pada BUMDesa serta meningkatnya keterampilan dan kesadaran kewajiban pertanggungjawaban BUMDesa dengan melakukan penyusunan dokumen laporan keuangan mengikuti kaidah-kaidah standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dengan demikian laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDesa Kabawakole dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala desa dan masyarakat secara umum serta dapat dianalisa oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terhadap kondisi keuangan BUMDesa. Selain itu dokumen laporan

keuangan telah memenuhi syarat penyajian wajar laporan keuangan entitas yaitu menyajikan informasi yang relevan, representasi tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Dengan adanya pengelolaan BUMDesa yang memungkinkan munculnya pendapatan atau beban BUMDes maka laporan pertanggungjawaban keuangan harus dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada pemerintah desa dan *stakeholder* terkait, sehingga penyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk membantu BUMDesa Kabawakole untuk menyusun kebijakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Dasar kegiatan ini adalah permintaan kebutuhan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka memperbaiki penyusunan laporan keuangan dari BUMDesa Kabawakole. Untuk mencapai tujuan kegiatan, Tim PKM melakukan *survey* untuk mengumpulkan bahan dan analisis kondisi pelaporan keuangan BUMDesa Kabawakole. Hasil analisis awal menunjukkan beberapa kelemahan dalam pelaporan keuangan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, kami menetapkan prioritas kegiatan yang segera dilaksanakan yaitu memberikan pemahaman konsep dasar akuntansi, menyusun pedoman kebijakan akuntansi, menjelaskan aplikasi laporan keuangan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari upaya untuk mendukung serta membantu pemerintah Desa Kabawakole dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus BUMDes. Kegiatan PKM mendapat dukungan dan tanggapan positif dari pemerintah desa dan seluruh peserta dalam kegiatan PKM ini. Sesudah mengikuti kegiatan PKM ini peserta sudah dapat memahami dan terampil serta berkomitmen untuk menata, mengelola dan mengembangkan BUMDes dengan baik khususnya dalam laporan keuangan sesuai siklus akuntansi yang diterapkan. Kegiatan pelatihan laporan keuangan BUMDes dapat meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes, meningkatkan keterampilan dalam membuat laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, L. M. H., Ulfa, M., Arya, A., Wijaya, M., & Azhar, L. M. (2022). *Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Guna Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kabupaten Buton Selatan*. 2(2), 58–65.
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(1), 19–39. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>
- Hayyuna, R., Pratiwi, R. N., Mindarti, L. I., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2005). Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk , Kecamatan Ujungpangkah , Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(72), 1–5.
- Idrus, M., & Syachbrani, W. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Munte. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada ...*, 3, 792–795. <https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/16299>
- Kusuma, S. I., Pambudi, S. B., & Suprayitno, A. W. (2019). Standar Biaya Dan Kinerja: Pengaruh Sbk Terhadap Efisiensi Anggaran K/L. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss1.art45>
- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. (2014). *Strategi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu , Kabupaten Blora)*. 6, 69–72.
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung

- Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). Keberadaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai penguatan ekonomi desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Coristya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Risal, R., Wulandari, R., & Jaurino, J. (2020). Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.949>
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). *Sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) se RT A Menumbuhkan Perekonomian Desa*. V(1), 1–14.